

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anak Agung Gede Triyatna dan I. Gusti Ngurah Parwata, “Kriminalisasi Terhadap Pembuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, “*Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8. No. 04 (Juni, 2019).
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bunga Dewi, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011.
- D. Sarjono *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997
- Eka Dewi. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung.
- Kartini, Kartono. 1981. *Patologi Sosial Jilid 1*. Bandung :PT Raja Grafindo Persada
- Kartini, Kartono. 2009. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tutar dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams
- Mukaron Zaenal, 2015 *Manajemen pelayanan Publik*, Bandung: 2015.
- Mayhew, P. & Mossman, E (2007). *Exiting prostitution: Models of best practice*. Crime and Justice Research Centre, Victoria University of Wellington, New Zealand
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Muhaimim, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univerisity Press, Mataram,
- Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) (Palembang: Rafah Press, 2020).
- Nardi. 2013. *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*. Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- Retna Eny, Sriati Rismintari, 2009, *Asuhan Kebidanan Komunitas*, Yogyakarta: Nuha Medika,

Retna Eny, Sriati Rismintari, 2009, *Asuhan Kebidanan Komunitas*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Siregar, Purnomo. Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafitipers; 1983.

Soekanto Soejono 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Tribowo Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi,” E-Journal Komunitas Yistitia, Vol. 4. No. 2 (Agustus, 2021), 533

B. Artikel Jurnal

Diva, Gede., 2009, *Mengembangkan UKM melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*, Jakarta : Bakrie School of Management

Haryanti, Tuty., 2023 “Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila”, *Thesis*, Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi.

Jonathan Surya Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Jurist-Diction*, Vol

Kebijakan Publik dan Administrasi Publik <http://map.uma.ac.id/2020/08/kebijakan-publik/> (dikutip pada hari Minggu 3 September 2023, Pukul 11.08 WIB.

Kartika Tyas., 2018 “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Ditinjau dari Aspek Kesehatan Reproduksi di Pasar Kembang (Sarkem) Yogyakarta*”, *Thesis*, Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Sastri Pratiwi., 2022 “Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo”, *Skripsi*, Hukum, Universitas K, Semarang.

Putra, Fadhilla. 2012. *New Publik Governance*. Malang: UB Press.

Prastiwi, Agnes Novita Andy. 2007., *Kebutuhan-Kebutuhan Psikologis Perempuan Pekerja Seks (Studi Kasus Di Komplek Wisata Bandungan Ambarawa)*”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata

Fahmi Abdullah, *Skripsi*: “*Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila*” (Malang: UB, 2016).

Lucky Elza Aditya, “*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*” (Tesis—Universitas Brawijaya, Malang, 2016)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 298 Tentang Perzinahan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Pasal 29)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3), Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7), Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (5), Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1), Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1), Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1), Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1), Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007)

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran ditempat Umum (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955 Nomor 7)

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1)

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3)

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8)

D. Internet

Badan Statistik Kota Yogyakarta (dikutip pada hari Minggu, 3 September 2023, pada Pukul 10.37 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020, diakses dari <https://kbbi.web.id/pelayanan> pada 1 September 2023 pukul 13.34 WIB

Jogja Dataku. <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku> (diakses pada hari Rabu, 29 September 2023, pada pukul 07.35 WIB)